



Merdeka Belajar: A Study of the Pros and Cons for Education in Indonesia

Yulizar Abidarda¹, Rudi Haryadi²

^{1,2}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

Abstract : This research aims to examine a number of literature that discusses the pros and cons of the Merdeka Belajar policy which has been implemented since the end of 2020. The research method in this article uses a systematic literature review. Eighteen key articles were obtained from the selection of a total of 836 scientific article titles obtained from the Google Scholar database. Eighteen articles were studied systematically to obtain conclusions regarding the pros and cons of the Merdeka Belajar policy. The research results found that the Merdeka Belajar policy, although considered a breakthrough in the millennial era, is not free from pros and cons. Some of the advantages are that it is simpler and deeper, more independent, more relevant and interactive, and more humane to students and educators. Meanwhile, the weaknesses that have become criticism of this policy include, among other things, the unpreparedness of technology, human resources, and the ineffectiveness of the Ministry's communication in grounding the concept of Independent Learning, resulting in misunderstandings in the field. It is recommended for readers to study more deeply the impact of the Merdeka Belajar policy for more specific fields of science, or for various institutions.

Keywords : Pros-Cons; Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Merdeka Curriculum; Indonesian Education.

Merdeka Belajar: Kajian Mengenai Pro-Kontranya bagi Pendidikan di Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejumlah literatur yang membahas mengenai pro-kontra kebijakan Merdeka Belajar yang telah mulai diimplementasikan sejak akhir 2020. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan kajian literatur sistematis. Delapan belas artikel kunci didapat dari hasil seleksi terhadap total 836 judul artikel ilmiah yang diperoleh dari database Google Scholar. Kedelapanbelas artikel dikaji secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pro-kontra kebijakan Merdeka Belajar. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan Merdeka Belajar meskipun dianggap sebagai suatu terobosan di era milenial, namun tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kelebihan adalah lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif, serta lebih memanusiakan peserta didik maupun pendidik. Sedangkan kelemahannya yang menjadi kritik pada kebijakan ini antara lain disebabkan karena ketidaksiapan teknologi, sumber daya manusia, dan kekurangefektifan komunikasi Kementerian dalam membumikan konsep Merdeka Belajar sehingga terjadi kesalahpahaman di lapangan. Disarankan bagi pembaca untuk mempelajari lebih dalam dampak kebijakan Merdeka Belajar bagi bidang-bidang ilmu yang lebih spesifik, atau bagi instansi-instansi yang beragam.

Kata kunci : Pro-Kontra; Merdeka Belajar; Kampus Merdeka; Kurikulum Merdeka; Pendidikan Indonesia.

Article history

Received: 20 June 2024

Revised: 27 June 2024

Accepted: 28 June 2024

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution (CC-BY) license



Corresponding Author: Yulizar Abidarda ; Lizarazha@abidarda.gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan zaman membawa pengaruh besar terhadap pemikiran dan perilaku peserta didik, hal ini disebabkan oleh semakin derasnya arus teknologi seolah tanpa batas yang di dalamnya terdapat berbagai macam konten (baik positif maupun negatif), budaya dan kemajuan, dimana peserta didik dapat mengakses dan berselancar dengan berbagai macam konten melalui kecanggihan

teknologi (Barkatillah, 2020). Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada era ini, terutama bidang Information and Communication Technology (ICT) yang serba canggih membuat dunia ini semakin luas, karena kecanggihan teknologi ICT ini beragam informasi dari berbagai sudut dunia mampu diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun, komunikasi antar pribadi dapat dilakukan dengan murah, mudah, kapanpun dan dimanapun (Nuriyati & Chanifudin, 2020).

Pendidikan saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Pendidikan menghadapi jenis peserta didik yang jauh lebih beragam, materi pembelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir peserta didik yang lebih tinggi, bukan lagi kepandaian tetapi kreatifitas dan kecerdasan bertindak (hard-skills dan soft-skills). Konsep pendidikan baru tentunya perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik generasi yang menghabiskan banyak waktu yang dirangsang oleh media digital. Konten harus spesifik, ringkas dan cepat dalam pembelajaran sehingga generasi-generasi milenial bisa menerima penyajian yang diberikan pendidik dan tidak haus akan informasi (Wijayanti, 2021).

Terlebih pada awal tahun 2020 lalu merupakan awal yang cukup berat dengan adanya pandemi Covid-19, kasus Covid-19 tidak hanya melumpuhkan ekonomi suatu Negara tetapi juga layanan pendidikan. Indonesia sebagai negara terdampak melakukan berbagai upaya untuk memperkecil kasus penularan Covid-19 terutama di bidang pendidikan dengan melakukan pembelajaran secara daring (Suhartono, 2021).

Pada masa inilah diambil sebuah langkah kebijakan yang dianggap menjadi solusi bagi permasalahan ini. Kebijakan yang diambil perlu memiliki peran besar dalam pelaksanaan pendidikan berbasis ICT. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Suhartono, 2021). Surat Edaran tersebut menguatkan pentingnya memanfaatkan media daring dalam proses belajar mengajar yang sudah barang tentu mendorong pendidik maupun peserta didik untuk menjadi lebih melek pada perkembangan zaman.

Walau demikian, terjadi sejumlah polemik di seluruh negeri berkaitan dengan penerapan belajar daring ini. Kekurangan kemampuan dan kekurangterbiasaan peserta didik maupun pendidik dalam memanfaatkan ICT dalam pembelajaran menjadi masalah. Guru dan orang tua bahkan mengalami kesulitan dalam mendidik anak pada masa ini sehingga terjadi learning loss (kehilangan pembelajaran) sebagai akibat dari ketidaksiapan penerapan teknologi dalam proses pendidikan (Hayati et al., 2021).

Di sisi lain, masalah seakan didukung dengan adanya hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan bahwa penilaian kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains dari peserta didik Indonesia masih sangat rendah (Iqbal et al., 2023). Temuan ini mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia menjadi semakin parah dengan adanya kehilangan pembelajaran akibat pandemic Covid-19.

Menteri Pendidikan saat ini, Nadiem Makarim, melakukan aksi nyata dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dihasilkan dari diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan tim internal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Maula et al., 2021). Kebijakan inilah yang disebut sebagai Merdeka Belajar.

Walau demikian, pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk kebijakan Merdeka Belajar yang dianggap sebagai suatu terobosan baru di dunia pendidikan juga memiliki sejumlah problematika, seperti kesalahpahaman dan kekurangsiapan pendidik dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar di sekolah, serta ketidaksiapan faktor ekonomi peserta didik dan orang tua dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran (Ahid & Sufirmansyah, 2022). Masalah juga menghampiri dunia perguruan tinggi berkaitan dengan implementasi hak belajar 3

semester di luar program studi yang cukup merepotkan bagi pengelola program studi (HR & Wakia, 2021).

Pada akhirnya artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejumlah literatur yang membahas mengenai pro-kontra kebijakan Merdeka Belajar yang telah mulai diimplementasikan sejak akhir 2020 hingga 2023. Dengan pembahasan ini diharapkan pembaca akan memiliki persepsi dikotomis mengenai kebijakan Merdeka Belajar.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan kajian literatur. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sejumlah literatur berupa artikel ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan Merdeka Belajar di lingkup Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada rentang tahun 2020 hingga 2023 dari database Google Scholar. Peneliti menggunakan sejumlah kata kunci yang relevan dalam upaya menemukan literatur yang akan dikaji. Beberapa kata kunci yang digunakan oleh peneliti antara lain: “Merdeka Belajar”, “Kurikulum Merdeka”, dan “Kampus Merdeka”.

Berdasarkan hasil pencarian dengan 3 kata kunci yang telah disebutkan, diperoleh sebanyak 836 judul artikel ilmiah yang sesuai. Seluruh judul kemudian disortir kembali berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan penelitian dan ditemukan sejumlah 311 judul yang memenuhi kriteria. Abstrak dari 311 judul tersebut kemudian dikaji relevansinya dengan kriteria yang ditetapkan sehingga menghasilkan sebanyak 52 abstrak yang sesuai. Berikutnya, peneliti membaca keseluruhan 52 naskah tersebut dan menemukan 18 artikel yang membahas mengenai kelebihan dan kelemahan kurikulum merdeka belajar. Proses seleksi dan pembacaan naskah ini secara keseluruhannya dibantu dengan media Mendeley.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil seleksi akhir kajian literatur sistematis menemukan 18 artikel ilmiah yang membahas mengenai pro dan kontra kurikulum Merdeka Belajar baik di Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tabel 1 menunjukkan identitas artikel ilmiah hasil temuan pada penelitian ini.

Tabel 1 Artikel Ilmiah Hasil Seleksi

| No. | Penulis Artikel | Tahun | Metode | Temuan |
|-----|-----------------------------------|-------|---|--|
| 1 | Ahmad, Fadilah, Ningtyas, & Putri | 2021 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Kebijakan Merdeka Belajar di era milenial dianggap memiliki sejumlah kelebihan seperti mampu memfasilitasi berkembangnya pola pikir peserta didik, mengakselerasi inovasi di bidang pendidikan, dan dapat meningkatkan kecerdasan siswa. |
| 2 | Ariga | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Kurikulum merdeka itu kelebihanannya lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif |
| 3 | Arung, Murtadho, & Boeriswati | 2023 | Kualitatif (survei) | Survei ini mengungkap kebutuhan mendesak siswa, guru, dan lembaga mengenai penerapan konsep 'Merdeka Belajar'. Kebutuhan tersebut antara lain kebebasan dari formalitas, infrastruktur yang memadai, sistem penilaian evaluasi yang selaras dengan prinsip pendidikan gratis, dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. |
| 4 | Aulia | 2021 | Kualitatif (fenomenologi) | Salah satu kritik bagi kurikulum Merdeka di sekolah antara lain terdapat pada kebijakan penyederhanaan RPP. Sebagian guru menganggap bahwa tambahan lampiran di RPP masih sangat dibutuhkan |
| 5 | Bungawati | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Konsep merdeka belajar dianggap menjadi komponen pendukung dari era Society 5.0 dengan memadukan kemampuan manusia dalam |

| | | | | |
|----|--|------|--|--|
| | | | | memanfaatkan perkembangan teknologi. |
| 6 | Diswantika, Istimahayu, & Taufiq | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang sebagai formula yang tepat, tetapi masih dihadapi dengan kelemahan-kelemahan yang fatal yang berakibat pada kesulitan adaptasi kurikulum di program studi dengan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut |
| 7 | Juita & Yusmaridi | 2021 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Kurikulum Merdeka dianggap sejalan dengan hakikat filosofi humanistik, dimana program-program yang ada bertujuan untuk memanusiakan manusia. |
| 8 | Lembong, Lumapow, & Rotty | 2023 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Tantangan dalam implementasi Merdeka Belajar mencakup adaptasinya selama pandemi, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, terbatasnya pemahaman, dan perbaikan kualitas pembelajaran dan SDM. Walau begitu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, mengurangi beban administratif guru, serta dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. |
| 9 | Mushollin | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Hambatan dalam penerapan kurikulum Merdeka antara lain: kurangnya pemenuhan peningkatan kompetensi guru yang terprogram; guru belum mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada proses kerja yang akan dilakukan; dan perubahan standar kompetensi pembelajaran yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. |
| 10 | Pertiwi & Pusparini | 2021 | Kualitatif (fenomenologi) | Saat kurikulum Merdeka diluncurkan, tidak semua guru memahami konsep Merdeka Belajar meskipun mereka mendukung kebijakan ini. |
| 11 | Purike | 2021 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Masih ada misinterpretasi mengenai tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar. Karena adanya anggapan bahwa kurikulum Merdeka hanya bersifat pilihan, maka hal ini menjadi hambatan dan sulit untuk ditindaklanjuti. |
| 12 | Qona'ah | 2023 | Kualitatif (evaluatif) | Dalam implementasi praktis kurikulum Merdeka, agar satuan Pendidikan formal dapat menghadirkan kemandirian belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas, maka perlu adanya tutor yang berkualitas. |
| 13 | Rawati, Khodijah, & Suryana | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Ketersediaan SDM, alat teknologi, serta dukungan pemerintah sedang dibenturkan dengan kenyataan lapangan yang sedang kesulitan dalam memahami teknologi dan keterbatasan perhitungan dalam mengatur serta mendukung suksesnya pelaksanaan kebijaksanaan merdeka belajar |
| 14 | Retnaningrum, Widyatiningtyas, Sari, Sapulete, Solissa, & Sujana | 2023 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Butuh waktu bagi guru untuk memahami posisi dan perannya dalam mengimplementasikan kurikulum. Hal ini karena terjadi perubahan paradigma yang drastis. |
| 15 | Rezki, Thamrin, & Siswanto | 2023 | Kualitatif (<i>sentiment analysis</i>) | lebih besarnya respon negatif pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Januari 2020 hingga Maret 2022 |
| 16 | Sholeh, Syarifudi, & Suherman | 2023 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Guru penggerak memainkan peranan penting dalam transformasi pendidikan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Guru Penggerak berperan penting sebagai pemimpin transformasional, motivator, dan peningkat kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran serta sebagai guru praktis bagi guru lainnya. Guru penggerak menghadapi tantangan seperti fasilitas yang tidak memadai, akses internet yang terbatas, dan keterbatasan waktu yang mengurangi efektivitasnya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang peran mereka di sekolah, dan beberapa guru |

| | | | | |
|----|----------------------------|------|---|--|
| | | | | mungkin menunjukkan ketidakpedulian terhadap aktivitas mereka. |
| 17 | Tabroni, Jamil, & Nurarita | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Kebijakan Merdeka Belajar dapat meningkatkan potensi siswa, membebaskan guru dalam berinovasi, membuka informasi sekolah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekolah. |
| 18 | Zulya | 2022 | Kualitatif (<i>literature review</i>) | Pada pelaksanaan mekanisme Magang di luar program studi, muncul persoalan bagi PT kecil atau PT di lingkungan 3T. PT dan prodi dengan kategori tersebut rata-rata memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. |

Sumber data (diolah)

Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian, dapat dinyatakan bahwa tidak ada kurikulum yang sempurna. Kurikulum Merdeka juga memiliki pro dan kontranya sendiri, sebagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia di masa lalu yang pernah ada. Dalam sisi positif, Kurikulum Merdeka ini sangat membantu dalam menanggulangi permasalahan pembelajaran di tengah endemi Covid-19. Adanya kebijakan ini, secara tidak langsung memberikan kesempatan pada seluruh pihak, baik peserta didik ataupun guru agar dapat melakukan kemandirian dalam belajar. Mereka dapat leluasa mengeksplorasi tiap materi serta modul pelajaran yang saling berhubungan tanpa terdapatnya batas ruang dan waktu. Selain itu peningkatan layanan pendidikan yang mengikuti pengembangan teknologi menghasilkan pembelajaran yang semakin bermutu (Rawati et al., 2022). Kurikulum merdeka itu kelebihanannya lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif, sehingga sangat cocok diterapkan setelah Covid-19 (Ariga, 2022).

Ahmad, et.al. (2021) menganalisis bahwa munculnya kebijakan Merdeka Belajar di era milenial ini memiliki sejumlah kelebihan seperti mampu memfasilitasi berkembangnya pola pikir peserta didik, mengakselerasi inovasi di bidang pendidikan, dan dapat meningkatkan kecerdasan siswa. Kebijakan Merdeka Belajar juga dianggap dapat meningkatkan potensi siswa, membebaskan guru berinovasi, membuka informasi sekolah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekolah (Tabroni et al., 2022). Kebijakan ini juga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi dan karakter siswa, mengurangi beban administratif guru, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa (Lembong et al., 2023).

Kurikulum Merdeka dianggap sejalan dengan hakikat filosofi humanistik, dimana program-program yang ada bertujuan untuk memanusiakan manusia. Merdeka Belajar mendorong terjadinya pembelajaran individual dimana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran dengan iramanya sendiri dan cara mereka sendiri dalam mencapai tujuan. Guru maupun peserta didik bebas dalam menentukan cara belajar, metode, tujuan, materi, serta teknik penilaian selama itu masih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan kurikulum. Guru secara bebas menerjemahkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kreatifitasnya. Guru menentukan cara belajar bersama dengan peserta didiknya. Guru dan peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan penuh makna dan berarti. Memahami bahwa masing-masing peserta didik memiliki perbedaan merupakan pembelajaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Juita & Yusmaridi, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Paulo Freire, seorang tokoh filsafat pendidikan, konsep dasar manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri, maka ia menjadi merdeka, dalam arti bebas bisa melakukan apapun sesuai dengan pilihannya sendiri, dalam hal berpikir, berkreasi, dan berinovasi (Wulandari et al., 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan positif, kehadiran kebijakan Merdeka Belajar di dunia pendidikan Indonesia memiliki sejumlah kelebihan sebagai berikut: (1) Dapat membantu menanggulangi permasalahan kehilangan pembelajaran (*learning loss*) akibat pandemi Covid-19; (2) Memberi kesempatan pada peserta didik untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran secara bebas dan memanusiakan; (3) Membebaskan guru dari

beban administrasi dan tuntutan kurikulum yang kaku sehingga lebih adaptif dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing; (4) Meningkatkan kesadaran seluruh insan pendidikan mengenai pentingnya teknologi dan integrasi pelaksanaannya dalam pendidikan; (5) Meningkatkan partisipasi seluruh pihak, baik peserta didik, orang tua, guru, kepala sekolah, organisasi masyarakat, hingga akademisi dalam memajukan pendidikan di Indonesia; (6) Menghilangkan stigma eksklusifitas sekolah unggulan dan berorientasi pada peningkatan kualitas seluruh lembaga pendidikan secara merata; dan (7) Transparansi pendanaan pendidikan dan kecepatan akses program-program pendidikan yang lebih baik dengan sistem digitalisasi layanan pendidikan.

Selain kelebihan, Merdeka Belajar tidak lepas dari kritik akan sejumlah kelemahan yang dimiliki. Konsep Merdeka Belajar merupakan bagian dari era Society 5.0 dengan memadukan kemampuan manusia dengan perkembangan teknologi (Bungawati, 2022). Walau demikian, ketersediaan SDM, alat teknologi data serta dukungan pemerintah sedang dibenturkan dengan kenyataan lapangan di masyarakat yang sedang gelagapan dalam memahami teknologi dan keterbatasan perhitungan dalam mengatur serta mendukung suksesnya pelaksanaan kebijaksanaan merdeka belajar (Rawati et al., 2022). Penerapan konsep 'Merdeka Belajar' hanya bisa terwujud apabila kebutuhan yang layak dan mendesak telah terpenuhi sepenuhnya. Kebutuhan tersebut mencakup kebebasan dari formalitas, infrastruktur yang memadai, sistem penilaian evaluasi yang selaras dengan prinsip pendidikan gratis, dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah (Arung et al., 2023).

Saat kurikulum Merdeka Belajar lahir, tidak semua guru memahami konsep Merdeka Belajar meskipun mereka mendukung kebijakan ini (Pertiwi & Pusparini, 2021). Butuh waktu bagi guru untuk memahami posisi dan perannya dalam mengimplementasikan kurikulum. Hal ini karena terjadi perubahan paradigma yang drastis, dimana peran guru dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi hanya sebagai administrator yang disibukkan dengan tugas-tugas administratif dalam kesehariannya; guru sebagai pengembang kurikulum bertugas menganalisis, menafsirkan, dan mentransformasikan kurikulum dalam proses pembelajaran; guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru harus menerapkan metode pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar; dan sebagai fasilitator pembelajaran guru mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar (*directing and facilitating the learning*) agar proses pembelajaran lebih memadai (Retnaningrum et al., 2023).

Dalam hal lain seperti Program Guru Penggerak, meskipun dianggap telah berhasil meningkatkan lingkungan belajar mengajar di kelas, ternyata masih terdapat kendala yang dihadapi guru penggerak terkait masalah fasilitas, keterbatasan akses internet, dan keterbatasan waktu sehingga membatasi perannya. Selain itu, masih ditemukannya pemahaman yang kurang mengenai peran guru penggerak di sekolah serta adanya guru yang acuh tak acuh dan tidak mau dibimbing oleh guru penggerak (Sholeh et al., 2023).

Fenomena ini melahirkan hambatan berupa lambatnya penerapan Merdeka Belajar akibat: (1) kurangnya pemenuhan peningkatan kompetensi guru yang terprogram; (2) guru belum mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada proses kerja yang akan dilakukan; (3) perubahan standar kompetensi pembelajaran yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan (Mushollin, 2022).

Terkait dengan empat kebijakan utama Merdeka Belajar juga dianalisis memiliki beberapa kelemahan, seperti misalnya: (1) Dalam kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, karena belum ada standar maka memungkinkan kualitas tes tersebut bermasalah (Qona'ah, 2023); (2) Dalam kebijakan Ujian Nasional cenderung terlalu mudah karena asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dianggap kurang komprehensif (Qona'ah, 2023); (3) Dalam kebijakan RPP yang lebih sederhana, terdapat kemungkinan guru abai pada proses dan media pembelajaran yang efektif karena ketidakjelasan deskripsi metode dan media pembelajaran. Bahkan suatu penelitian menyebutkan bahwa sebagian guru menganggap bahwa tambahan lampiran di RPP masih sangat dibutuhkan (Aulia, 2021); dan (4) Dalam peraturan PPDB zonasi, sebenarnya tidak benar-benar merdeka karena

pilihan siswa dalam memilih sekolah berkualitas terbatas, demikian halnya dengan komposisi perpindahan dan afirmasi (Qona'ah, 2023).

Hingga kini, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) dipandang sebagai formula yang tepat, tetapi masih dihadapi dengan kelemahan-kelemahan yang fatal yang berakibat pada kesulitan adaptasi kurikulum di program studi dengan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut (Diswantika et al., 2022). Permasalahan penerapan kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi meliputi: (1) Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan Pihak Luar, mungkin bagi perguruan tinggi besar hal tersebut tidak menjadi masalah besar, namun berbanding terbalik dengan perguruan tinggi kecil dengan adanya kebijakan ini dapat memunculkan persoalan sendiri. Bagi perguruan tinggi kecil atau yang masuk pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil muncul berbagai masalah seperti sulitnya menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar atau dengan PTS dan PTN besar; (2) Mekanisme Magang di Luar Program Studi Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PT kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya (Zulya, 2022).

Sebuah analisis sentimen media sosial menunjukkan lebih besarnya respon negatif pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Januari 2020 hingga Maret 2022 (Rezki et al., 2023). Hal ini nampaknya disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” belum efektif karena masih banyaknya kesalahan penafsiran pesan yang dimaksud oleh Kemendikbud dengan penafsiran pesan yang diterima oleh kalangan sivitas akademika. Selain itu masih terdapat penolakan dari beberapa pengamat pendidikan dan juga perguruan tinggi yang merasa bahwa kebijakan ini belum siap untuk dilaksanakan dengan kondisi sebagian besar perguruan tinggi yang ada saat ini. Terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendikbud sendiri bahwa kebijakan ini hanyalah pilihan jika kondisi perguruan tinggi mampu untuk melaksanakannya. Hal ini menyiratkan bahwa implementasi kebijakan ini mengalami hambatan dan sulit untuk ditindaklanjuti (Purike, 2021).

Berdasarkan sejumlah analisis tersebut, maka diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kelemahan kebijakan Merdeka Belajar ini, yaitu: (1) Pada beberapa daerah di Indonesia, perkembangan teknologi belum memadai sehingga kesulitan untuk mengimplementasikan program-program Merdeka Belajar yang banyak memanfaatkan digitalisasi layanan pendidikan; (2) Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat belum efektif sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran pesan berkaitan dengan pembumih konsep Merdeka Belajar kepada praktisi pendidikan yang tersebar di daerah-daerah Indonesia; (3) Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan teknologi dan perubahan baru, sehingga memerlukan waktu yang realtif lama untuk menjiwai konsep Merdeka Belajar; (4) Adanya pernyataan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar hanya bersifat pilihan, sehingga tidak sedikit pelaksana pendidikan di lapangan yang lebih memilih untuk menggunakan cara lama dibanding repot-repot mempelajari konsep baru; (5) Dalam kebijakan Kampus Merdeka, terutama bagi PTS kecil, faktor pembiayaan menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan hak belajar 3 semester di luar program studi secara mandiri.

SIMPULAN

Di era milenial ini, konsep pendidikan telah mengalami perubahan mendasar. Sebagai bagian dari evolusi global yang pesat, pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional. Melainkan, ia telah menjadi sebuah perjalanan yang terus-menerus, dinamis, dan serba cepat. Merdeka belajar menjadi salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). Langkah ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi secara mendalam

melihat situasi dan kondisi sistem pendidikan di Indonesia. Terobosan yang dilakukan Menteri Nadiem ini banyak membawa perubahan. Hal ini diketahui setelah aksi nyata yang dilakukannya untuk melakukan perbaikan terhadap pendidikan di Indonesia mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan. Baik guru, dosen, pengelola lembaga pendidikan hingga siswa ataupun mahasiswa itu sendiri.

Walaupun Merdeka Belajar dipandang menjadi terobosan yang segar, kebijakan ini juga memiliki pro dan kontranya sendiri, sebagaimana kebijakan pendidikan Indonesia di masa lalu yang pernah ada. Beberapa kelebihanannya adalah lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif, serta lebih memanusiakan peserta didik maupun pendidik. Sedangkan kelemahannya yang menjadi kritik pada kebijakan ini antara lain disebabkan karena ketidaksiapan teknologi, sumber daya manusia, dan kekurangefektifan komunikasi Kementerian dalam membumikan konsep Merdeka Belajar sehingga terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Disarankan bagi pembaca untuk mempelajari lebih dalam dampak kebijakan Merdeka Belajar bagi bidang-bidang ilmu yang lebih spesifik, atau bagi instansi-instansi yang beragam. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk terus membuat pendidikan kita khususnya di negara ini semakin baik, dengan adanya konsep merdeka dalam belajar semoga membuat kita semua tersadar bahwa masa depan bangsa ini ada di para pemuda yang berpendidikan. Dengan kata lain kita semua ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbarui sistem yang dirasa sudah tertinggal. Karena dengan meminimalisir semua kekurangan dan juga dampak buruk dari sistem yang sudah diterapkan membuat perkembangan pendidikan serta pembelajaran negara kita semakin baik serta tidak ada salahnya belajar dengan mencontoh sistem dari negara lain jika memang bisa di terapkan di Indonesia guna semakin menyempurnakan sistem pendidikan nasional.

REFERENSI

- Ahid, N., & Sufirmansyah, S. (2022). the Implementation of Merdeka Belajar Policy in East Java. *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, 10(1), 149–168. <http://repository.unj.ac.id/724/>
- Ahmad, D. N. F., Fadilah, A. A., Ningtyas, D. C., & Putri, S. N. (2021). Merdeka Belajar Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 66. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4452>
- Ariga, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 662–670.
- Arung, F., Murthado, F., & Boeriswati, E. (2023). Merdeka Belajar: the Real Learning Needs of Students, Teachers, and Institutions Related to Demands for Independent Learning Innovation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 5(2), 120–135. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v5i2.20370>
- Aulia, R. W. (2021). Teachers' Perception on The New Policy Called Merdeka Belajar; A Page of Lesson Plan. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 14(2), 1967–1980. <https://doi.org/10.32806/jf.v14i02.5194>
- Barkatillah. (2020). Pendidikan Era Milenial (Peran Orang Tua Dan Guru). *Jurnal Al-Risalah*, 16(1), 61–82.
- Bungawati, B. (2022). Peluang dan Tantangan Kurikulum Merdeka Belajar Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan*, 31(3), 381. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i3.2847>
- Diswantika, N., Istirahayu, I., & Taufiq, A. (2022). Politik Pendidikan Di Indonesia Dan Isu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 121–128.
- Hastangka, & Hidayah, Y. (2023). Kebijakan dan Manajemen Pendidikan Merdeka Belajar Kampus

- Merdeka: Persoalan dan Tantangan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 8(1), 1–16.
- HR, S., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175–184.
- Iqbal, M., Rizki, A., Wardani, J. S., Khafifah, N. P., Silitonga, N., & Amirah, R. (2023). Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar. *Journal on Education*, 5(2), 2257–2265. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.878>
- Juita, D., & Yusmaridi, M. (2021). The Concept of “Merdeka Belajar” in the Perspective of Humanistic Learning Theory. *Spektrum: Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1), 20–30. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v9i1.111912>
- Kholik, E. N. (2021). Persiapan Pendidikan Menghadapi Era Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen ...*, 1299–1307. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/semnasmp/article/view/10877>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Mauizdati, N. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Sekolahnya Manusia Dari Munif Chatib. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 315–321. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1324>
- Maula, R., Oktaviningsih, E., Karomatul, K. R., Irawan, H. A., Febrianto, I., Ardianto, H., Hidayatullah, H., Pratama, M. S., Lutfi, M. F., Khoiron, M., & Amru, B. A. (2021). *Buku Saku Merdeka Belajar Episode 1-10 Kemendikbudristek*. In Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka (Issue August).
- Mushollin, A. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar pada Kurikulum SMP. *STAIKA*, 5(2), 68–78.
- Nuriyati, T., & Chanifudin, C. (2020). Pendidik Millennial di Era Globalisasi. *ASATIZA: Jurnal Pendidikan*, 1(3), 361–372. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v1i3.118>
- Pertiwi, A. K., & Puspardini, R. (2021). Vocational High School English Teachers’ Perspectives On “Merdeka Belajar” Curriculum. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1982–1992. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/672>
- Purike, E. (2021). Political Communications of The Ministry of Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (Independent Learning, Independent Campus)” Policy: Effective? *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline361>
- Qona’ah, I. (2023). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1421–1424. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1799>
- Rawati, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah. *MODELING : Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 82–97.
- Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., Sari, A. R., Sapulete, H., Solissa, E. M., & Sujana, I. G. (2023). Teacher’s Paradigm in Interpreting the Birth of the Merdeka Curriculum Policy. *Journal of Education Research*, 4(2), 435–442.
- Rezki, N., Thamrin, S. A., & Siswanto, S. (2023). Sentiment Analysis of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy Using Support Vector Machine With Word2Vec. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 17(1), 0481–0486. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss1pp0481-0486>
- Sari, R. M. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu

- Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 38–50.
- Sholeh, B., Syarifudin, E., & Suherman, S. (2023). Guru Penggerak in Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 982–986. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1272>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>
- Tabroni, I., Jamil, N. A., & Nurarita, N. (2022). Merdeka Belajar Policy as a Strategy to Improve Quality of Education. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i01.5492>
- Wijayanti, C. L. (2021). Mendidik Generasi Millennial Di Era Globalisasi. *AT-THUFULY : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 100–111. <https://doi.org/10.37812/atthufuly.v1i2.401>
- Windayani, N. L. I., & Putra, K. T. H. (2022). Gebrakan Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Pendidikan Untuk Mewujudkan SDM Unggul. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v3i2.2480>
- Wulandari, F., Aina, N., & Razak, H. (2019). Potensi Budaya Pada Kawasan Permukiman Tepian Sungai Studi Kasus Kelurahan Seberang Masjid. *NALARs*, 18(1), 57. <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.57-64>
- Zulya, A. A. (2022). Problematika Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 7(2), 1–6. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bk/article/view/1115%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bk/article/download/1115/95